

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

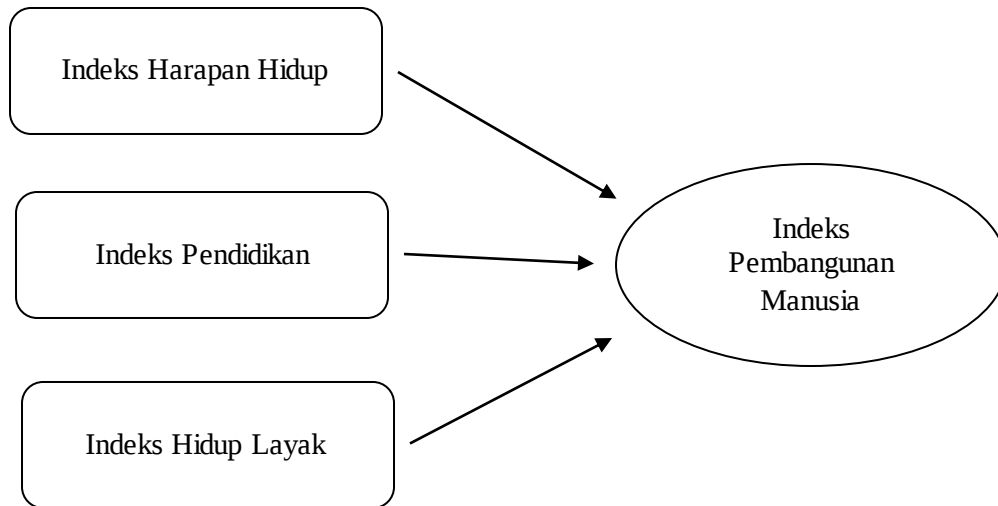
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangua sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang di sesuaikan (Michael PH, 2013:57). Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam IndeksPembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposityang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yangtelah disesuaikan menjadi proritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.(Yunita Mahrany, 2012-15).

Pembangunan manusia menurut Human Development Report yang dipublikasi oleh UNDP (2990) dalam BPS adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantaranya banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia secara meyeluruh.

2.1.1.2 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 2. 1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Adapun komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variable e_0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, Varian Trussel). Data yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara

menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi dan kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar

provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

2.1.1.3 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengetahui bagaimana kemajuan pembangunan manusia maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan oleh BPS mencakup tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak. Menurut BPS (2015), IPM setidaknya memiliki beberapa kegunaan yaitu:

1. Digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah
2. Digunakan sebagai salah satu alat ukur penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
4. Digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

2.1.1.4 Rumus Menghitung IPM

Rumus untuk menghitung IPM adalah :

$$IPM = 1/3 [X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n] \quad (1)$$

Dimana :

X_1 : Indeks harapan hidup

X_2 : Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks meke huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

X_3 : Indeks standar hidup layak/ indeks pengeluaran perkapita

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumus dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_i = \frac{X_i - X_{i \text{ min}}}{X_{i \text{ maks}} - X_{i \text{ min}}} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

X_1 : Indikator ke- i ($i = 1, 2, 3$)

X_2 : Nilai maksimum sekolah $X(i)$

X_3 : Nilai minimum sekolah $X(i)$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator $X(i)$ telah ditetapkan oleh UNDP sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2. 1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

INDIKATOR KOMPONEN IPM (=X(I))	NILAI MAKSIMUM	NILAI MINIMUM	KETERANGAN
	85	25	
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per Kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 (1996) 360.000 ^{b)} (1999)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : paparan Badan Pusat Statistik, 2009

Catatan :

Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 Penyesuaian garis kemiskinan dengan garis kemiskinan baru.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Sedangkan menurut Suryana (2005:5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi, serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak.

Menurut Boediono dalam Robinso Tarigan (2004), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, sedangkan menurut (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai peningkatan total output (PDB) dalam jangka panjang terlepas dari apakah kenaikan tersebut lebih kecil atau lebih signifikan daripada laju pertumbuhan penduduk, dan apakah diikuti oleh struktur pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses yang berkelanjutan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001).

Menurut Sukirno (2006:9) pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari perkembangan perekonomian dalam periode masa tertentu bila dibandingkan dengan masa sebelumnya dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perubahan pendapatan nasional merupakan perubahan dari nilai suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara pada periode tertentu yang nilainya disebut dengan *Produk Domestic Bruto* (PDB) atau Gross Nasional Produk (GNP). Menurut Todaro dan Stephen C.

Smith (2006:9), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi, alokasi biaya minimum dari keterbatasan sumber daya dan pertumbuhan dari sumber daya yang dioptimalkan. Menurut kesimpulan dari Badrudin (2012:115) bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan pendapatan nasional GDP atau GNP tanpa memandang apakah ada perubahan struktur ekonomi yang terjadi di suatu negara.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi, merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) ada

lima faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menentukan hal yang sangat penting pada pertumbuhan ekonomi didalam suatu negara yaitu dengan memperhitungkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang telah tersedia secara langsung dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dengan ilmu keterampilan, kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan yang sudah dimiliki. Jika pada suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik, terampil dan terlatih maka output yang akan dihasilkan memiliki kualitas tinggi.

Tetapi kekurangan akan sumber daya manusia terampil bisa menghambat pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada surplus terhadap sumber daya manusia ini akan kurang signifikan didalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sumber daya manusia didalam suatu negara harus sebanding dengan jumlahnya pada keterampilan dan kemampuan yang sedang dibutuhkan, sehingga menghasilkan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah

manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal terdiri berdasarkan dengan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi lainnya. Pembentukan modal adalah proses produksi pada semua produk yang berasal dari buatan manusia.

Pembentukan modal bisa meningkatkan ketersediaan modal pada tenaga kerja, bisa meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja. Akibatnya, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang bisa menghasilkan pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari jangka pembentukan modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam model pertumbuhan ekonomi Harod-Domar meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

4. Pengembangan Teknologi

Teknologi memiliki sifat dan jenis pada instrumen teknis yang dipakai dengan sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Negara-negara yang sudah memakai pengembangan teknologi dapat tumbuh

secara pesat dibandingkan pada negara-negara yang tidak menggunakannya. Pemilihan pengembangan teknologi secara tepat bisa berperan penting pada pertumbuhan ekonomi.

5. Faktor Sosial dan Politik

Faktor sosial terdiri berdasarkan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan didalam setiap negara, hal tersebut bisa memberikan kontribusi pada suatu pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik suatu negara bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Jika saat kondisi politik dalam suatu negara stabil akan berjalan dengan baik dan dapat memberikan kenyamanan terhadap para masyarakat dan juga mendukung peningkatan kinerja pada produksi. Dengan begitu masyarakat bebas akan berinovasi dan mengembangkan potensi yang telah dimilikinya, sehingga akan terbentaknya pencapaian pada pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini di pelopori oleh Ada Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan.

Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan

penduduk akan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Soow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor- faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod- Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*).

4. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan

mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada

2.1.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perkeekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan standar hidupnya sehinggakan meningkatkan indeks pemabangunan manusia. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi para ekonom menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total dalam perekonomian (Gregory Mankiw, 2000). Besarnya pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

2.1.3 Kemiskinan

2.1.3.1 Konsep kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak (Ritonga 2003).

Kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak Mencher, 2011. Menurut Tjahya (2000) menyebutkan bahwa penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, pengemis dan pengangguran yang marak. Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dengan demikian merupakan dua istilah yang sinonim. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Ia terbelakang karena ia miskin, dan tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan.

Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Masyarakat suatu negara terbelakang tercekam oleh kemiskinan. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal dan produksi yang telah usang. Dengan begitu produktivitas marginalnya menjadi sangat rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan nyata rendah, tabungan rendah, investasi rendah, dan tingkat pembentukan modal rendah.

2.1.3.2 Definisi kemiskinan menurut para ahli

- 1) Menurut BAPPENAS, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

- 2) Menurut Syaifuddin, membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolute dan sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba kekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni pandang (model)kebudayaan, dan carapandang (Model) Struktural.
- 3) Hall dan Midgley, menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatof dbandungkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat
- 4) Menurut Faturachma dan Marcelinus Molo, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.1.3.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Mudjat Kuncoro, (2006:125) terdapat tiga penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi antara lain:

1. Kemiskinan muncul karema adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapat yang timpang penduduk miskin hanya memiliki sumber yang terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat pendapatan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah yang pada gilirannya upahnya rendah pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena pendapatan akses dalam modal, bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketersediaan akses manusia mempunyai keterbatasan dalam memilih.

Menurut Paul Spicker (2002), penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab, yaitu:

1. *Individual explanation*, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri; malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial explanation*, akibat faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural explanation*, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.

2.1.3.4 Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM

Indonesia mengukur kemiskinan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan indeks per kepala (*Head Count Index*), yaitu jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis

kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yaitu mengukur derajat kerimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien gini antar masyarakat miskin atau koefisien variasi pendapatan antar masyarakat miskin. Koefisien gini atau koefisien variasi pendapatan antar masyarakat miskin. Koefisien gini atau koefisien variasi pendapatan antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak. Orang miskin memiliki kemampuan daya beli yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Keadaan tersebut membuat standar hidupnya menjadi rendah. Standar hidup yang rendah dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan manusia, karena standar hidup merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konsep pembangunan manusia ditunjukkan kemajuan manusia atau kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Kemiskinan merupakan kondisi yang berlawanan dengan pembangunan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya kemiskinan berhubungan negatif atau berlawanan dengan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatn daerah memegang perananyang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerontah darah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatanasli daerah lainnya yang sah.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh HAW, Widjaja, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan darah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik darah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. (Widjaja.2002:110).

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis Pajak Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hibur
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Rokok
- i. Pajak Kendaraan Bermotor
- j. Pajak Air Permukaan, dll.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut ketentuan pasal I UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu: Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa jenis retribusi antara lain:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- c. Retribusi Terminal
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- f. Retribusi Pelayanan Pasar, dll.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No.33 Tahun 2004):

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Lain-lai pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan diatas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU Nomor 33 Tahun 2004):

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum

m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n. Pendapatan dan angsuran/cicilan penjualan

5. Upaya peningkatan kemampuan PAD

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar. Untuk itu, upaya intensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan.

Masdiasmo (2004) juga menambahkan bahwa pada prinsipnya, sistem perpajakan harus ekonomis, efisien dan adil (*economy, efficiency, and equity*) serta sederhana dalam pengadministrasiannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah antara lain:

- a. Perlunya dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
- b. *Checking system*, pengecekan atas penerimaan daerah untuk menjamin semua penerimaan masuk dengan benar.
- c. Pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah: dan

- d. Metode menghitung potensi pajak dan retribusi yang efektif.

2.1.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap IPM

Dari penelitian yang dilakukan Putra & Ulupui (2015), Nova Yu srita Santi (2019), Dara Estu Satiti (2019) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) menyatakan bahwa berpengaruhnya PAD terhadap IPM karena PAD lebih banyak digunakan untuk belanja modal maupun belanja rutin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dilakukan penulis mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Periode 2010-2021”.

Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul dan Sumber	Independen	Dependen	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Zulfikar Hasan, The Effect Of Economic Growth And Human Development Indeks On Poverty InIndonesia. Journal of Economics and Sustainability (JES), 2021, Volume 3, Issue 1, 42-53.	Pertumbuha n Ekonomi, kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2.	Adelfina, I Made Jember. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, dan belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bali periode 2005-2013. E-Jurnal EP Unud, 5 [10] : 1011-1025	Pertumbuha n Ekonomi, Kemiskinan ,	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3.	Arung Lambaa, Risky Novanb, Ramasoyan Arung Lambac , Kurniawan Patmad. The Impact of Economic Growth and Capital Expenditures in Supporting	Pertumbuha n ekonomi,	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

	Quality Human Development. The International Journal Of Social Sciences World.			
4.	Ridwan Maulana, Prasetyo Ari Bowo. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011. Journal of economics and Policy	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.
5.	Diah Komariah, Mukhammad Yogiandoro, Alexandra Hukom. Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, No. S1 (Desember,2019): 523-532 P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165.	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.
6.	Andhita Astriani, Muchtolifah, Sishadiyati. Pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif

	ekonomi, dan belanja modal terhadap ipm DI kabupaten Nganjuk tahun 2010-2019. Sintax Ides: p- ISSN: 2684-6853 e- ISSN: 2684-883X Vol.3, No 7, Juli 2021			dan signifikan. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
7.	Zuraida Rakhmawati, Mohamad Rafki Nazar, Djusimar Zutilisna. The Influence of economy Growt, Original Local Goverment Revenue, and Local Expenditure to integrity of Human Develpomnet Index. e-Proceeding of Management: Vol 4, No.2 Agustus 2017. ISSN : 2355-9357	Pertumbuhan Ekonomi, Pendaatan Asli Daerah	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
8.	Pieter Noisirifan. Pengaruh Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten kepualan Yapen.	Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol.2 No.2, September 2017. ISSN: 2541-0180			Indeks Pembangunan Manusia.
9.	Winsy A. Tarumingkeng, Vekie A. Rimate, Tri Oldy Rotinsulu. Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018)	Kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM
10.	Denni Sulistio Mirza. Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal.	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Hubungan Dan Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
11.	Andriana Okta Fara Diba, Moehammad Fathorrazi, Rafael Purtomo Somaji.	Pendapatan Asli Daerah, Kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap IPM. Kemiskinan

	Pengaruh Kemiskinan, PDRB,dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.			berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.
12.	Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, Nurul Huda. Pengaruh Kemiskinan, TingkatPengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020,212-222.	Kemiskinan , PertumbuhanEkonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM.
13.	Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad FajarSuryo Agung. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel Intervening (studi pada	Pendapatan Asli Daerah	Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM.

	kabupaten/kota Provinsi Riau periode 2011-2015)			
14.	Rindang Mustikawati. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, PDRB perkapita dan angka kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia per provinsi di Pulau Jawa tahun 2004-2011. UNS-F. EkonomiJur. Ekonomi Pembangunan F.0110110-2014.	Pendapatan Asli Daerah	Indeks Pembangunan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM.
15.	Yuli Wantri Simarmata, Deden Dinar Iskandar. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM . Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. JDEP Vol.5 No.1 (2022)hlm. 78-94.	Kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah merupakan beberapa faktor yang turut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesiasalah satunya di Pulau Jawa. Hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa adalah sebagai berikut:

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia terdapat tiga indikator IPM yang digunakan yaitu: tingkat kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, dan tingkat daya beli yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Karena pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Lugastoro (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Krisna Dewi (2014) menunjukkan Pertumbuhan Ekonomisecara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Meksipun beberapa konsep menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki dua causation dengan pembangunan manusia, namun dalam prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi agar dual causation tersebut terjadi. Selain faktor yang

mempengaruhi agar dual causation bisa terjadi, ada pula faktor penguat yang berhubungan dengan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana yang diungkapkan Ranis dkk (2000) bahwa “faktor penguatan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi meliputi struktur ekonomi, distribusi asset, kebijakan, social capital, investasi yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, dan kebijakan ekonomi yang tepat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi tingkat IPM. Artinya tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai IPM yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, salah satu bentuk keberhasilan pembangunan yang mengartikan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau daerah tertentu sudah memberikan kontribusi yang positif terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi pada tinggi rendahnya angka IPM.

2.2.2 Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Rumahorbo (2014) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan dan menurut Sulistio Mirza (2011) dalam jurnal yang berjudul “ Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah” menyatakan bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM

di Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin Meningkat.

Todari (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Yani Mulyaningsih (2008) Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (Healthy Life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjouw, et al (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin asset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya mendapatkan pendapatan

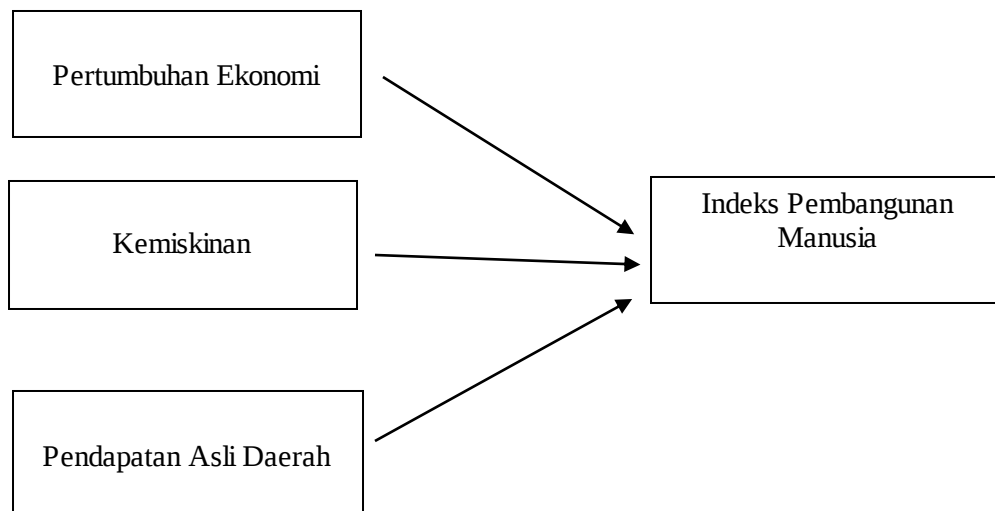
2.2.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Wandira (2013) dalam Kuspriyanto (2016) menyatakan bahwa di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan dan

mengembangkan PAD nya masing-masing dengan cara meningkatkan sumber daya yang dimiliki untuk membiayai kegiatan-kegiatan penciptaan sarana-prasarana atau infrastruktur daerah. Sekecil apapun presentase PAD dari total pendapatan, kontribusi PAD tersebut akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi belanja daerah yang dikeluarkan. Dengan demikian dana yang digunakan semakin tinggi sehingga kegiatan pembangunan manusia yang dilakukan oleh daerah akan lebih banyak. Berdasarkan penelitian oleh Ardiansyah *et al* (2014) mengenai hubungan PAD, DAU, dan DAK terhadap kualitas pembangunan manusia menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PAD terhadap IPM. Hal tersebut didukung oleh penelitian sejenis yang dilakukan oleh Kuspriyanto (2016), yang juga menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia.

Secara skematis pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selaludirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih (J.Supranto, 1997).

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah di paparkan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Diduga secara parsial pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif sedangkan Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010- 2021.
2. Diduga secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa periode 2010-2021.